

ABSTRAK

Nama : Humaidin Akbar
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Monitoring Kebijakan Perizinan Penyelenggara Usaha Karaoke
Tahun 2017 – 2019 Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpandu Satu Pintu Kabupaten Jember

Usaha Karaoke adalah salah satu usaha paling pesat berkembang di Kabupaten Jember. Banyaknya jumlah usaha karaoke melakukan pelanggaran izin usaha. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.Bagaimana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember dalam melakukan monitoring kebijakan perizinan penyelenggara usaha karaoke tahun 2017 – 2019. 2. Faktor apa saja yang menghambat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember dalam melakukan monitoring kebijakan perizinan penyelenggara usaha karaoke tahun 2017 – 2019.

Konsep teori yang digunakan adalah menurut Zelthauzallam ada dua jenis monitoring (pengawasan), yaitu monitoring internal dan monitoring eksternal, peneliti memfokuskan monitoring Internal karena monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena yang terjadi. Hasil penelitian adalah : Pengawasan kebijakan perizinan penyelenggara usaha karaoke di tahun 2017 – 2019 yang di lakukan instansi terkait dalam melakukan pengawasan TDUP khususnya usaha karaoke di Kabupaten Jember belum berjalan maksimal, karena banyak terdapat pelanggaran izin usaha karaoke yang belum memiliki izin lengkap dan belum memperpanjang izin usaha.

Kata kunci : Pengawasan, Kebijakan, Usaha Karaoke

ABSTRACT

Name : Humaidin Akbar
Study Program : Ilmu Pemerintahan
Title : Monitoring Kebijakan Perizinan Penyelenggara Usaha Karaoke
Tahun 2017 – 2019 Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpandu Satu Pintu Kabupaten Jember

Karaoke Business is one of the fastest growing businesses in Jember Regency. A large number of karaoke businesses violate business licenses. This of course can disturb public order. To overcome this problem as contained in the Regulation of the Minister of Tourism of the Republic of Indonesia Number 10 Year 2018 Regarding the Licensing Services for Electronically Integrated Tourism Sector.

The formulation of the problem in this study are: 1. How is the Office of Investment and PTSP of Jember Regency in monitoring the licensing policy of karaoke business operators in 2017 - 2019. 2. What factors are hampering the Office of Investment and PTSP of Jember Regency in monitoring the licensing policies of the organizers Karaoke business in 2017 - 2019.

The theoretical concept used is according to Zelthauzallam there are two types of monitoring, namely internal monitoring and external monitoring, researchers focus on internal monitoring because internal monitoring is monitoring carried out from within the organization concerned. In this research, qualitative descriptive research is used, that is research that aims to describe the phenomena that occur. The results of the study are: Supervision of licensing policies for karaoke business operators in 2017 - 2019 carried out by related agencies in conducting TDUP supervision, especially karaoke business in Jember Regency, has not run optimally, because there are many violations of karaoke business licenses that do not have complete licenses and have not extended licenses effort.

Keywords: Supervision, Policy, Karaoke Business